

**PENGARUH KARAKTERISTIK
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

VIRA FORTUNA WIDYANINGRUM
NIM : 12030110120124

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Vira Fortuna Widyaningrum
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120124
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP PENYAJIAN
KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**
Dosen Pembimbing : Faisal, S.E., M.Si., Akt., Ph.D.

Semarang, 23 Februari 2015

Dosen Pembimbing,

(Faisal, S.E., M.Si., Akt., Ph.D.)
NIP : 109709042001121001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Vira Fortuna Widyaningrum
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120124
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**
Dosen Pembimbing : Faisal, S.E., M.Si., Akt., Ph.D.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 13 Maret 2015

Tim Penguji

1. Faisal, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. (.....)
2. Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt. (.....)
3. Adityawarman, S.E., M.Acc., Ak. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Vira Fortuna Widyaningrum menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENGARUH KARAKTERISTIK CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN “** adalah hasil tulisan saya sendiri. Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat atau sebagian tulisan yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat maupun pemikiran yang berasal dari penulis lain, yang seolah-olah menjadi sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau tulisan yang saya ambil dari penulisan orang lain tanpa memberi pengakuan penulis aslinya

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 23 Februari 2015

Yang membuat pernyataan,

(Vira Fortuna Widyaningrum)
NIM: 12030110120124

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki-Mu yang halal (supaya aku terhindar)
dari yang haram, perkadanglah aku dengan karunia-Mu (supaya aku tidak
meminta) kepada selain-Mu”

(HR. Tirmidzi)

Tiga kunci sukses :

Tahu lebih banyak dari orang lain

Berusaha lebih keras dari orang lain

Berharap lebih sedikit dari orang lain

(William Shakesphere)

“Always aim higher”

(Ayah)

Dipersembahkan kepada :

Kedua Orangtua dan Adik

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of corporate governance characteristics on the financial restatement. Indicators used to measure corporate governance mechanisms in this study are the size of board, proportion of independent board, size of audit committee, audit committee independence, audit committee's financial expertise, managerial ownership, and institutional. While financial restatement are measured using dummy variable which used "1" if the firm restate and "0" if the firm non-restate. This study also tests several control variables namely firm size, leverage, profitability, and industry.

Data for this study are obtained from annual report of companies listed on Indonesia Exchange Stock (BEI) in 2009-2013. The sampling method used to draw the sample is purposive sampling. Sample contains from 19 restate companies and 19 non-restate companies. A control group comprising between restating firms and non-restating firms are matched by firm size and industry. The criteria of restatement companies allowed from GAO's definition of restatement and exclude restatement that was happened due to application of new PSAK, accounting method changes, merge and acquisition that accordance with PSAK, and stock splits or reverse stock. The hypothesis testing use logistic regression analysis.

The results show that the size of board and institutional ownership negatively affects the financial restatement. While proportion of independent board, size of audit committee, audit committee independence, and managerial ownership did not significantly affect restatement. Overall, it can be concluded that two corporate governance characteristics affect with occurrence of restatement.

Keywords: *corporate governance, financial restatement, GAO*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap penyajian kembali laporan keuangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur karakteristik *corporate governance* adalah ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian bidang keuangan komite audit, kepemilikan saham manajerial, dan kepemilikan saham institusional. Sedangkan, penyajian kembali laporan keuangan diukur dengan variabel dummy, dimana angka 1 jika perusahaan yang melakukan *restatement*, dan angka 0 jika perusahaan tidak melakukan *restatement*. Penelitian ini juga menguji beberapa variabel kontrol, yaitu: ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan jenis industri.

Data pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan dengan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2013. Metode pengambilan sampel yang digunakan untuk mengambil sampel penelitian ini adalah *purposive sampling*, dimana sampel terdiri dari 19 perusahaan yang melakukan *restatement* dan 19 perusahaan kontrol yang tidak melakukan *restatement*. Perusahaan kontrol dibentuk untuk membandingkan antara perusahaan yang melakukan *restatement* dan perusahaan yang tidak melakukan *restatement* kemudian dicocokkan dengan ukuran perusahaan dan jenis industri. Kriteria perusahaan *restatement* dipilih berdasarkan *GAO's definition of restatement* dimana sampel tidak termasuk perusahaan yang melakukan *restatement* karena penerapan PSAK, perubahan metode akuntansi, merger dan akuisisi yang sesuai PSAK, dan pemecahan atau penggabungan saham. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi logistik.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan kepemilikan saham institusional berpengaruh negatif terhadap keterjadian *restatement*. Sedangkan independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, dan kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kedua karakteristik *corporate governance* mempengaruhi keterjadian *restatement*.

Kata kunci : *corporate governance, restatement, GAO*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kepada kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan”.

Selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bimbingan, arahan, dorongan semangat, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, S.E., M. Si.selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan FakultasEkonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Faisal, S.E, M.Si, Akt, Ph.D. selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang telah memberikan banyak arahan dan masukan yang sangat bermanfaat terkait pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Segenap dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu dalam penyusunan skripsi dengan memberikan masukan dan kritikan yang membangun. Semoga Allah membalas semua kebaikan bapak dan ibu dosen

5. Seluruh staf Akuntansi Reguler 1 atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan dalam bidang akademik dan pelayanan mahasiswa.
6. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Sanyoto Kusumo dan Ibu Sri Widayati yang selalu memberikan semangat dan dorongan serta mendoakan saya dalam pembuatan skripsi ini. Semoga penulis selalu dapat membahagiakan keluarga dan menjadi anak yang berbakti untuk Bapak dan Ibu.
7. Adikku tersayang, Maudy Fadhilah Widya Damayanti yang telah memberikan semangat, doa, dan keceriaan bagi penulis dalam kondisi apapun.
8. Kakek dan nenek tercinta, kakek R. Mulyo Kusumo (alm) dan nenek Hj. Siti Norma Baha (alm) yang selalu memberikan contoh yang insyaaAllah sesuai dengan Al-qur'an dan hadits. Terima kasih selalu memberikan yang terbaik.
9. Saudaraku tersayang, Rimaputi Febriyanti, Petra, dan Dita yang telah memberikan kebahagiaan dan keceriaan untuk penulis serta dorongan dalam hal apapun.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
11. Untuk teman spesial, Ghafara Mawaridi Mazini Tundjung, terimakasih telah memberikan pengalaman yang baru, dukungan doa dan semangat serta membantu penulis dalam hal apapun dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi.

12. Sahabat terbaikku, Syoraya, Agnes, Tika, Rika, Arvina, Amos, Dece, Habibi, Irwan, Yogi, Norman, Andika, Yudha, Erlang, Rheza, Emma, Olin, Desty, Febry, Shelly, Renaldo, Aritama, Yahdi, Rifai dan Seger atas bantuan, dukungan, doa, semangat, kenangan dan segala waktu yang ada untuk penulis serta menghibur ketika merasa kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa reunion dalam keadaan sukses dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.
13. Sahabat tersayang Ryssa, Destima, Destika dan Nadia yang telah memberi semangat, dorongan, dan menjadi teman berbagi serta menghibur ketika merasa sedih dan kesulitan untuk penulis.
14. Sahabat idiot, Nana, Ryssa, dan Nita yang telah memberikan hiburan dan keceriaan serta teman berbagi kepada penulis.
15. Sahabat suka maupun duka, Riza, Olan, Desita, dan Albana yang selalu punya ide untuk mencari hal menarik, menghibur penulis dalam kesulitan, dan bertukar wawasan secara matang.
16. Teman SMP dan SMA, Ririn, Ima, Nindy, Tika, Farisah, Yuni, Ayu, Wuri, Yulia, Dimas, Isnan, Bagus, dan Adi atas segala waktu yang ada untuk penulis.
17. Teman-teman KKN Desa Banyuputih, Kab. BatangAlam, Difa, Dinda, Kanida, Gita, Maretha, Gita, Wibhi, Jeri, Samuel, Okky, Holan, dan Arya yang telah menjadi teman seperjuangan selama KKN.

18. Teman-teman Jurusan Akuntansi 2010 Reguler I yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan cerita dan kenangan selama penulis berkuliah di Undip.
19. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis sangat berharap atas kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya.

Wassalammualaikum Wr Wb

Semarang, 23 Februari 2015

Yang membuat pernyataan,

(Vira Fortuna Widyaningrum)
NIM: 12030110120124

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitia	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TELAAH PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori Penelitian dan Penelitian Terdahulu	14
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	14
2.1.2 Penyajian Kembali (<i>Restatement</i>).....	17
2.1.3 <i>Corporate Governance</i>	20
2.1.4 Dewan Komisaris.....	22
2.1.4.1 Ukuran Dewan Komisaris.....	23
2.1.4.2 Independensi Dewan Komisaris.....	24
2.1.5 Komite Audit.....	26
2.1.5.1 Ukuran Komite Audit.....	27
2.1.5.2 Independensi Komite Audit	27
2.1.5.3 Keahlian Keuangan Komite Audit.....	28
2.1.6 Kepemilikan Saham Manajerial.....	28
2.1.7 Kepemilikan Saham Institusional	29
2.2 Penelitian Terdahulu	30
2.3 Kerangka Pemikiran.....	35
2.4 Pengembangan Hipotesis	36
2.4.1 Ukuran Dewan Komisaris.....	36
2.4.2 Independensi Dewan Komisaris.....	37
2.4.3 Ukuran Komite Audit.....	39
2.4.4 Independensi Komite Audit	40

2.4.5 Keahlian Keuangan Komite Audit.....	41
2.4.6 Kepemilikan Saham Manajerial.....	41
2.4.7 Kepemilikan Saham Institusional	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	44
3.1.1 Variabel Terikat (Variabel Dependen).....	44
3.1.2 Variabel Bebas (Variabel Independen)	45
3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris	45
3.1.2.2 Independensi Dewan Komisaris.....	45
3.1.2.3 Ukuran Komite Audit.....	46
3.1.2.4 Independensi Komite Audit	46
3.1.2.5 Keahlian Keuangan Komite Audit.....	46
3.1.2.6 Kepemilikan Saham Manajerial.....	47
3.1.2.7 Kepemilikan Saham Institusional	47
3.1.3 Variabel Kontrol	48
3.1.3.1 Ukuran Perusahaan	48
3.1.3.2 <i>Leverage</i>	49
3.1.3.3 Profitabilitas	49
3.1.3.4 Jenis Industri	49
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	50
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	51
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	51
3.5 Metode Analisis Data.....	51
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	52
3.5.2 Pengujian Hipotesis.....	52
3.5.2.1 Uji Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit	54
3.5.2.2 Uji Kelayakan Keseluruhan Model.....	54
3.5.2.3 Uji Nagelkerke R Square	55
3.5.2.4 Uji Signifikansi Koefisien Regresi	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	57

4.2 Analisis Data	58
4.2.1 Analisis Data Statistik Deskriptif.....	58
4.2.2 Analisis Regresi Logistik	64
4.2.2.1 Uji <i>Hosmer and Lameshow's Goodness of Fit</i>	64
4.2.2.2 Uji <i>Overall Fit Model</i>	65
4.2.2.3 Uji Koefisien Determinasi (<i>Nagelkerke R Square</i>)...	67
4.2.2.4 Uji Regresi Logistik	67
4.3 Uji Hipotesis	68
4.4 Interpretasi Hasil	73
4.4.1 Ukuran Dewan Komisaris.....	73
4.4.2 Independensi Dewan Komisaris.....	74
4.4.3 Ukuran Komite Audit.....	75
4.4.4 Independensi Komite Audit	76
4.4.5 Keahlian Keuangan Komite Audit.....	77
4.4.6 Kepemilikan Saham Manajerial.....	78
4.4.7 Kepemilikan Saham Institusional	79
4.4.8 Variabel Kontrol	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	82
5.3 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	36
------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4.1 Perincian Sampel	58
Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Komite Audit Independen	59
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Jenis Industri Berdasarkan <i>Restatement</i>	59
Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif	60
Tabel 4.5 <i>Hosmer & Lemeshow Test</i>	65
Tabel 4.6 Perubahan Nilai -2LL	66
Tabel 4.7 <i>Omnibus Test of Model Coefficient</i>	66
Tabel 4.8 Nilai R^2	67
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Logistik	68
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Penelitian	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah penyajian kembali keuangan terus semakin dikenal sebagai jumlah penyajian kembali yang terus tumbuh mengikuti kasus profil tinggi pada masa lalu yang tersisa investor dengan kerugian yang cukup besar. Namun, isu-isu terkait laporan keuangan telah banyak terjadi di berbagai negara. AS *General Accounting Office* atau GAO (2002) mengestimasi kerugian yang ditimbulkan dari adanya *restatement* laporan keuangan perusahaan pada tahun 1997-2002 di pasar AS. GAO menyatakan kerugian kapitalisasi pasar di AS sebesar US \$ 100 miliar dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap pasar modal (GAO, 2006). Kemudian Enron, misalnya, mengumumkan US \$ 618.000.000 kerugian dalam laporan kuartalan ketiga 2001. Beberapa minggu setelah pengumuman ini, Enron mengungkapkan bahwa ia harus menyatakan kembali pendapatan untuk beberapa tahun sebelumnya (Sridharan et al., 2002). Akibatnya, nilai saham Enron turun dari tertinggi US \$ 90 per saham (atau sekitar US \$ 60 miliar total) hanya sen, mengakibatkan hilangnya kertas US \$ 90 miliar pemegang saham.

Di Indonesia, isu tentang penyajian laba kembali terjadi pada tahun 2002. PT Kimia Farma diharuskan melakukan *earning restatement* pada laporan keuangannya setelah Kementerian BUMN dan Bapepam melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dan terungkap bahwa laba disajikan lebih tinggi dari laba sebenarnya dengan cara menggelembungkan nilai harga pada daftar persediaan sehingga menimbulkan *overstated* (Tempo, 2002). KAP Hans

Tuanakotta dan Mustofa yang menangani kasus ini telah mengikuti standar akuntansi yang berlaku, tetapi gagal mendeteksi kecurangan ini. Akibat penyajian kembali ini, pemerintah melakukan divestasi saham ke PT Kimia Farma.

Berbagai kasus *earningrestatement* yang dilakukan oleh perusahaan dapat menjadi gambaran tentang kualitas dari suatu laporan keuangan. Definisi *restatement* umumnya dipandang sebagai koreksi terhadap laporan keuangan karena tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Palmrose dan Scholz, 2000; Efendi et al, 2004; Myers et al, 2004). GAO (2002, hal. 1) menyatakan bahwa penyajian kembali laporan keuangan terjadi ketika sebuah perusahaan, baik sukarela atau diminta oleh auditor atau regulator, merevisi informasi keuangan publik yang dilaporkan sebelumnya. Ketika kesalahan seperti itu ditemukan, perusahaan harus memperingatkan investor bahwa laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya tidak lagi dapat diandalkan dan ditinjau untuk penyajian ulang. Alasan penyajian kembali keuangan bervariasi, terutama ketika penipuan terlibat telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan tentang kecukupan tata kelola perusahaan dan pengawasan pengungkapan keuangan (GAO, 2002). Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara praktek tata kelola perusahaan dan kejadian penyajian kembali keuangan (Efendi et al., 2004).

Seperti pada kasus PT Kimia Farma, praktek penggelembungan laba yang dilakukan perusahaan menyebabkan laporan keuangan harus disajikan ulang karena terdapat kesalahan pencatatan yang menurut Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dapat menyesatkan para investor dalam mengambil keputusan ekonomi. Praktek *restatement* yang banyak dilakukan perusahaan membuat

beberapa kalangan memandang kasus ini sebagai akibat dari lemahnya sistem *good corporate governance* (GCG) perusahaan dalam membuat dan mengawasi proses pembuatan laporan keuangan. Menurut *Cadbury Report*, *corporate governance* merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan tanggungjawabnya kepada para *shareholder dan stakeholder*.

Bagi perusahaan publik, tata kelola perusahaan dianggap sebagai salah satu mekanisme yang secara efektif dapat melindungi kepentingan pemegang saham perusahaan. *Corporate governance* mengatur tentang kewenangan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan, seperti komisaris, direksi, manajer, dan pemegang saham agar dapat memahami fungsi, peran, dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan perusahaan. Tujuannya adalah sebagai pendorong untuk memastikan pemeriksaan yang efektif dan sistem keseimbangan, sehingga manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, tindakan tata kelola perusahaan sebagai alat untuk mendisiplinkan, meneliti, dan memonitor manajemen (Abdullah, 2010).

Menurut Nuryani (2010) tindakan *restatement* yang dilakukan perusahaan, mengindikasikan adanya tujuan manipulasi angka-angka yang dapat mempengaruhi laba kualitas perusahaan serta informasi dalam laporan keuangan tersebut dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan adanya praktik *restatement* yang banyak dilakukan perusahaan mencerminkan lemahnya sistem tata kelola perusahaan dalam membuat dan mengawasi laporan keuangan.

Mekanisme tata kelola perusahaan berguna untuk mencegah terjadi penyajian kembali laporan keuangan, karena tata kelola perusahaan bertujuan untuk memberikan laporan keuangan secara tepat waktu serta memberikan pengawasan dalam membuat laporan keuangan (Veronica, 2005). Karakteristik *corporate governance* juga berperan dalam mencegah munculnya salah saji dalam laporan keuangan dengan caramemastikan bahwa pengungkapan dibuat secara tepat waktu dan akurat pada semua hal yang material mengenai korporasi, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Agar dapat berfungsi dengan baik, laporan keuangan yang dibuat manajemen harus memiliki kualitas yang baik serta dapat diandalkan.

Untuk dapat menegakan sistem *Good Corporate Governance*, berbagai upaya telah dilakukan. Pada tahun 1992 di Inggris, terbentuk *Cadbury Committee* yang memberikan beberapa rekomendasi dalam menerapkan *corporate governance*. Sedangkan di Amerika, terdapat 10 rekomendasi mengenai *corporate governance* dibuat oleh Blue Ribbon Committee pada tahun 1999 (BRC, 1999). Adapun di Indonesia, pada tahun 2001 Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) membuat suatu panduan *good corporate governance* dimana panduan ini disempurnakan pada tahun 2006. Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dasar tentang konsep dan pola pelaksanaan GCG, dimana dalam panduan tersebut terdapat pedoman untuk pembentukan beberapa komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, salah satunya komite audit (KNKG, 2001).

Salah satu unsur dalam pembentukan *corporate governance* adalah dewan komisaris. Dewan komisaris secara luas dipercaya memainkan peranan penting

khususnya dalam memonitor manajemen tingkat atas (Gunarsih dan Hartadi, 2002). Dewan komisaris bertugas untuk menjamin terlaksananya strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terjadinya akuntabilitas (FCGI, 2003). Secara khusus, komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris sangat berperan dalam meminimumkan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Penelitian telah menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dikaitkan dengan sedikit kemungkinan terjadinya penipuan keuangan (Beasley, 1996), berkurangnya *earnings management* (Chtourou et al, 2001; Klein, 2002; Peasnell et al, 2005). Dengan pengawasan yang efektif dari komisaris, diharapkan kecurangan dalam laporan keuangan dapat diminimalisir dan kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan. Disamping itu, ukuran dewan komisaris juga dapat menentukan seberapa efektif pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris serta kemungkinan pengambilan keputusan secara efektif, cepat, dan tepat.

Unsur *corporate governance* lainnya adalah komite audit. Peran komite audit dalam upaya untuk menjamin kualitas dari laporan keuangan perusahaan telah menjadi suatu pertimbangan yang berarti, terutama setelah maraknya tindakan manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen perusahaan dan skandal akuntansi yang terjadi pada beberapa perusahaan besar di dunia (Lin et al., 2006), termasuk di Indonesia. Pada tahun 2000, pasar saham Indonesia mulai mengharuskan setiap perusahaan yang terdaftar untuk memiliki komite audit. BEJ mensyaratkan bahwa setidaknya seorang anggota komite audit harus memiliki keahlian keuangan (Veronica, 2005). Peraturan tentang ketentuan komite audit

pada perusahaan publik juga telah diatur dalam surat edaran BAPEPAM No.KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004. Komite audit diangkat oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab terhadap dewan komisaris. Ukuran komite audit menjadi faktor yang harus diperhatikan, tujuannya agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Menurut KNKG, komite audit dipimpin oleh seorang komisaris independen dan setidaknya 2 (dua) orang anggota. Selain memperhatikan ukuran, independensi menjadi karakteristik yang sangat penting bagi komite audit. Semakin independen komite audit, maka semakin besar kemungkinan untuk dapat melakukan yang pengawasan pelaporan keuangan yang lebih efektif karena komite audit tidak dipengaruhi oleh manajemen. Independensi komite audit ini penting karena memastikan objektivitas (Kolins et al., 1991). Independensi juga diperlukan dalam menilai kinerja auditor internal, mengatasi konflik auditor eksternal.

Karakteristik lain yang diperlukan adalah adanya *financial expertise*. Abbott et al. (2004) melaporkan bahwa setidaknya satu anggota dengan keahlian keuangan berhubungan negatif dengan terjadinya penyajian kembali di periode 1991-1998. *Financial expertise* diperlukan dalam suatu komite audit, karena hal ini terkait dengan tujuan komite audit yaitu memeriksa dan mengawasi proses pelaporan keuangan. DeZoort dan Salterio (2001) menyatakan bahwa komite audit dengan keahlian keuangan meningkatkan kemungkinan bahwa salah saji material terdeteksi akan dikomunikasikan kepada komite audit dan dikoreksi secara tepat waktu.

Selain dewan komisaris dan komite audit, struktur kepemilikan merupakan bagian penting dalam proses implementasi *good corporate governance*. Struktur kepemilikan menjelaskan komitmen dari pemiliknya untuk menyelamatkan perusahaan (Wardhani, 2005) dalam (Nuraeni, 2010). Anderson dan Yohn (2002) meneliti perusahaan yang menerbitkan penyajian kembali laporan keuangan yang telah diaudit. Mereka menemukan bahwa rata-rata penurunan harga saham perusahaan di sekitar tanggal penyajian kembali, penurunan bahkan lebih tinggi untuk perusahaan dengan pendapatan disajikan kembali. Kopi (2005) berpendapat bahwa perbedaan struktur kepemilikan menyebabkan perbedaan dalam sifat skandal perusahaan dan insiden penyajian kembali. Kepemilikan saham institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et. al 2006) dalam Winanda (2009). Pemilik saham institusional cenderung berperilaku aktif untuk dapat meningkatkan terjadinya pengawasan terhadap manajemen karena setiap keputusan manajemen akan berdampak langsung bagi mereka. Kehadiran investor institusi memberikan pentingnya mekanisme pengawasan untuk memastikan tindakan manajemen untuk kepentingan para pemegang saham (Abdullah, 2010).

Kepemilikan saham manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris perusahaan (Boediono, 2005). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik di keagenan adalah dengan cara meningkatkan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan. Pada proporsi yang lebih rendah dari kepemilikan manajerial,

manajer diharapkan untuk jujur dengan pemegang saham lainnya karena mereka sedang dipantau oleh pemegang saham lainnya. Dengan demikian, laporan keuangan diharapkan bebas dari kesalahan atau penyimpangan. Namun, ketika manajer memiliki proporsi saham yang cukup besar, maka diharapkan untuk mendominasi perusahaan. Manajer akan memiliki insentif yang lebih besar untuk menunjukkan kepada pemegang saham lain bahwa perusahaan telah melakukan sangat baik secara finansial. Hal ini mengindikasikan pentingnya kepemilikan manajerial dalam struktur kepemilikan perusahaan (Abdullah, 2010).

Penelitian mengenai pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap keterjadian *restatement* telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Abdullah (2010) yang meneliti pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap keterjadian *financial restatement* menemukan bahwa *restatement* terjadi pada perusahaan yang independensi komite nominasinya rendah serta memiliki proporsi kepemilikan manajerial yang tinggi, selain itu independensi komite audit berhubungan dengan keterjadian *earning restatement*. Penelitian serupa mengenai pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap keterjadian *restatement* juga telah dilakukan oleh Veronica (2005) yang menemukan bahwa independensi komisaris, proporsi kepemilikan saham, dan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap keterjadian *restatement*. Sedangkan Larry (2011), menyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap keterjadian *earning restatement*. Hal ini diperkuat dengan penelitian Rani (2011) yang menyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap keterjadian penyajian laba kembali.

Namun terdapat hasil berbeda seperti yang diteliti oleh Lin (2006) menyatakan tidak terdapat hubungan antara independensi komite audit dengan *earningrestatement*. Begitu juga dengan Carcello (2008) yang menguji antara keahlian keuangan komite auditor terhadap manajemen laba. Carcello menemukan bahwa tidak terdapat asosiasi antara keahlian keuangan dengan manajemen laba.

Dari hasil berbagai penelitian di atas, terdapat hasil yang tidak konsisten antara penelitian satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena perbedaan metode pengukuran setiap variabel dan sampel. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Rani (2011) dan Pertiwi (2012) menggunakan sampel perusahaan yang melakukan *restatement*, namun tidak diidentifikasi dan diklasifikasikan lebih lanjut mengenai faktor penyebab *restatement*. *Restatement* yang disebabkan oleh penerapan PSAK baru, proses akuisisi yang sesuai PSAK, perubahan metode akuntansi yang baru, dan *stocksplits* tidak dimasukkan sebagai sampel karena faktor-faktor tersebut tidak mengindikasikan adanya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara karakteristik tata kelola perusahaan sebagai variabel independen dan penyajian kembali laporan keuangan sebagai variabel dependen. Pada penelitian ini sampel perusahaan yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Secara lebih khusus di ambil dari perusahaan yang melakukan *restatement* selama tahun 2009-2013.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengetahui pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap *Restatement*. Peneliti bermaksud

melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap Penyajian Kembali Laporan Keuangan”.

1.2 Rumusan Masalah

Angka perusahaan yang mengalami *restatement* dari tahun ke tahun mengalami pasang surut. Hal ini sebagai indikasi bahwa *restatement* laporan keuangan akan selalu ada setiap tahunnya jika perusahaan tidak melakukan kontrol manajemen yang baik. Salah satu alasan terjadinya *restatement* laporan keuangan yaitu banyaknya perusahaan yang melakukan kecurangan (*fraud*).

Dalam Agrawal dan Chada (2005) menyatakan adanya relevansi tentang ketidakandalan laba yang dilaporkan yang terus meningkat, dibuktikan dengan kekhawatiran yang disebabkan karena meningkatnya frekuensi *restatement* oleh perusahaan beberapa tahun terakhir. Begitu pula dengan hasil penelitian Nuryani (2010) yang menyatakan bahwa keterjadian *restatement* dapat mempengaruhi kualitas laba perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel yang digunakan. Selain itu penelitian ini menambahkan variabel baru yaitu keahlian keuangan yang dimiliki komite audit dengan tujuan komite audit yaitu memeriksa dan mengawasi proses pelaporan keuangan. Oleh karena itu dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh negatif antara ukuran dewan komisaris terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan?
2. Apakah terdapat pengaruh negatif antara independensi dewan komisaris terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan?

3. Apakah terdapat pengaruh negatif antara ukuran komite audit terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan?
4. Apakah terdapat pengaruh negatif antara independensi komite audit terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan?
5. Apakah terdapat pengaruh negatif antara keahlian keuangan yang dimiliki komite audit terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan?
6. Apakah terdapat pengaruh negatif antara kepemilikan saham manajerial terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan?
7. Apakah terdapat pengaruh negatif antara kepemilikan saham institusional terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh negatif antara ukuran dewan komisaris terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh negatif antara independensi dewan komisaris terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh negatif antara ukuran komite audit terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh negatif antara independensi komite audit terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan.
5. Untuk menganalisis pengaruh negatif antara keahlian keuangan yang dimiliki komite audit terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan.

6. Untuk menganalisis pengaruh negatif antara kepemilikan saham manajerial terhadap keterjadian penyajian kembali laporan keuangan.
7. Untuk menganalisis pengaruh negatif antara kepemilikan saham institusional dengan keterjadian penyajian kembali laporan keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diperlukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak - pihak berikut:

1. Bagi akademisi, diharapkan dapat melengkapi temuan empiris yang telah ada dan bagi penelitian selanjutnya dapat dijadikan referensi dan acuan.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan pencegahan tindakan kecurangan keuangan dan menjelaskan dampak yang tidak efektif jika perusahaan mengalami *restatement* dalam laporan keuangannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Bagian sistematika penulisan mencakup uraian ringkasan dari materi yang dibahas pada skripsi ini. Penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi yang akan dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan pustaka, berisi landasan Teori yang merupakan acuan pemikiran dalam pembahasan masalah yang diteliti dan mendasari analisis yang diambil dari berbagai literatur, ringkasan penelitian

terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, konsep dan hipotesis, dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III, Metode Penelitian merupakan cara-cara meneliti yang menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan. Bab ini juga menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif.

BAB IV, Hasil dan Pembahasan, merupakan bab inti dalam laporan penelitian ini. Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi hasil analisis pembahasan objek penelitian.

BAB V, Penutup, berisi tentang simpulan dari laporan penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian, maupun bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori Agensi menurut Anthony dan Govindarajan (2005) merupakan teori yang mendasari hubungan antara *principal* dan *agent* dengan asumsi bahwa setiap individu termotivasi atas kepentingannya masing-masing, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara keduanya. *Principal* yang dimaksud disini adalah *shareholders*, dimana *principal* ini mempekerjakan individu lain sebagai *agent* (manajer) untuk melakukan suatu jasa tertentu dan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Konflik agensi dapat dikurangi apabila manajer dan *shareholders* memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga manajer akan bertindak atas kepentingan *principal* (*shareholders*).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan yang mulai berkembang mengacu kepada pemenuhan tujuan utama dari manajemen yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan ini dilakukan oleh manajemen yang disebut agen. Teori keagenan menyatakan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang berbeda.

Konflik keagenan muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Pemilik perusahaan memberikan kewenangan kepada dewan komisaris dan direksi untuk mengurus jalannya perusahaan serta membuat

keputusan atas nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimilikinya, maka manajer berkemungkinan untuk bertindak tidak yang terbaik bagi kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan. Pihak manajer menginginkan *fee* kontraktual sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya, sebaliknya pihak pemilik termotivasi mengadakan kontrak dengan agen untuk memaksimalkan return untuk menambah kesejahteraan dirinya. Dengan kata lain, manajemen mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemilik (Riyanto, 2003). Konflik kepentingan ini terus meningkat karena pemilik tidak dapat memonitor aktivitas manajer sehari-hari untuk memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemegang saham. Manajer yang terlibat langsung dengan proses kegiatan perusahaan, memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan para pemilik saham. Hal ini lah yang disebut dengan asimetris informasi.

Pada akhirnya, konflik kepentingan dan asimetris informasi tersebut dapat mendorong agen untuk tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada prinsipal dan dapat berpengaruh pada penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat dapat menjadi tidak relevan dan tidak netral karena laporan keuangan berpihak pada kepentingan sang agen. Laporan keuangan ditampilkan sebagus mungkin melalui manipulasi yang dilakukan oleh manajemen yang pada akhirnya dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan dan pada akhirnya membuat laporan keuangan tersebut harus disajikan kembali (Kusumo, 2014).

Untuk mengatasi masalah keagenan, penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) dibutuhkan untuk melindungi kepentingan prinsipal. GCG merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, dimana GCG dibuat untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dapat memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* dana yang telah mereka investasikan.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan biaya-biaya agensi yang digunakan oleh prinsipal untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen sebagai berikut :

1. *Monitoring Cost*

Monitoring cost atau biaya monitoring adalah biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengamati, mengukur, dan mengontrol aktivitas-aktivitas yang dilakukan pihak manajemen. Biaya ini termasuk biaya untuk audit, rencana kompensasi eksekutif, dan juga biaya untuk memberhentikan manajer.

2. *Bonding Cost*

Bonding cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjamin agen agar agen bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan manajer. Para agen akan diberi kompensasi yang wajar apabila bertindak sesuai dengan keinginan pemilik dan tidak akan diberikan kompensasi apabila tidak bertindak sesuai dengan keinginan pemilik.

3. *Residual Loss*

Penyelarasan kepentingan antara prinsipal dan agen masih sulit dilakukan meskipun telah mengeluarkan *monitoring* dan *bonding*. Akibatnya, timbulah *agency losses* dari perbedaan kepentingan atau disebut dengan *residual losses*. *Residual loss* menunjukkan adanya *trade off* antara membatasi manajer dan memaksakan mekanisme kontrak yang didesain untuk mengurangi *agency problems*. Secara umum, tidak ada perusahaan yang tidak memiliki biaya keagenan kecuali bagi perusahaan yang dikelola sepenuhnya oleh seorang manajer (Jensen and Meckling, 1997).

2.1.2 Penyajian Kembali Laporan Keuangan (*Restatement*)

Penyajian kembali laporan keuangan (*restatement*) merupakan revisi terhadap laporan keuangan yang sebelumnya telah dilaporkan secara publik yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Levitt, 2000). Penyajian kembali laporan keuangan dapat pula didefinisikan sebagai revisi dan publikasi satu atau lebih dari laporan keuangan sebelumnya perusahaan. Dalam penyajian laporan keuangan sebuah perusahaan, tidak jarang ditemukan hal-hal yang menyebabkan laporan keuangan harus direvisi ataupun disajikan kembali, baik itu disebabkan karena adanya kekeliruan perhitungan matematis, kekeliruan penerapan kebijakan akuntansi, kecurangan, kelalaian, adanya penerapan kebijakan akuntansi yang baru ataupun karena adanya perubahan estimasi akuntansi. Penyajian kembali laporan keuangan memberikan dampak negatif terhadap investor dan menyebabkan harga saham menurun.

PSAK No. 25 mengelompokkan faktor utama yang mempengaruhi revisi atau penyajian kembali laporan keuangan ke dalam 3 kelompok, yaitu (1) Perubahan Estimasi Akuntansi (*changes in accounting estimates*), (2) Kesalahan Mendasar (*fundamental errors*), dan (3) Perubahan Kebijakan Akuntansi (*changes in accounting policies*).

A. Perubahan Estimasi Akuntansi (*Changes in Accounting Estimates*)

Penyajian laporan keuangan sering memerlukan adanya estimasi, seperti misalnya estimasi atas penyisihan piutang tak tertagih, keusangan persediaan, estimasi masa manfaat dari aset tetap yang dapat disusutkan, estimasi cadangan imbalan pasca kerja dan lain sebagainya.

Paragraf 26 PSAK No. 25 mengatur bahwa suatu perubahan dalam estimasi akuntansi dapat hanya mempengaruhi periode berjalan ataupun mempengaruhi periode berjalan maupun periode-periode yang akan datang. Sebagai contoh, perubahan dalam estimasi masa manfaat aset yang dapat disusutkan akan mempengaruhi beban penyusutan pada periode berjalan dan pada setiap periode selama masa manfaat yang tersisa dari aset tersebut.

Dengan kata lain, perubahan estimasi akuntansi berdasarkan PSAK No. 25 harus diterapkan secara prospektif, artinya bahwa perubahan yang terjadi diterapkan pada kejadian atau transaksi yang terjadi setelah tanggal perubahan. Tidak ada penyesuaian yang berhubungan dengan periode sebelumnya yang dilakukan baik pada saldo laba awal periode (*retained earnings*) atau dalam pelaporan laba atau rugi bersih untuk periode sekarang, karena saldo yang ada tidak dihitung kembali.

B. Kesalahan Mendasar (*Fundamental Errors*)

Paragraf 30 – 36 PSAK No. 25 mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas kesalahan mendasar. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau lebih periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Koreksi atas kesalahan tersebut biasanya dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan yang mendasar, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan saldo laba awal periode. Informasi komparatif harus dinyatakan kembali, kecuali jika untuk melaksanakannya dianggap tidak praktis.

Dengan kata lain, suatu koreksi atas kesalahan mendasar dalam pelaporan keuangan harus diterapkan secara retrospektif, artinya bahwa laporan keuangan yang menyajikan informasi komparatif untuk periode sebelumnya, disajikan seolah-olah kesalahan mendasar telah dikoreksi dalam periode di mana kesalahan tersebut dibuat. Jumlah koreksi yang berhubungan dengan setiap periode dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. Sedangkan jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif, disesuaikan pada saldo laba awal periode dalam periode yang paling awal.

C. Perubahan Kebijakan Akuntansi (*Changes in Accounting Policies*)

Pemakai laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan suatu perusahaan selama beberapa periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan suatu perusahaan.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya *restatement*. Menurut GAO's *definition of Restatement* (2006), faktor-faktor penyebab *restatement* diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria, yaitu *restatement* yang disebabkan karena: 1) Akuisisi dan merger yang tidak sesuai peraturan. 2) Kesalahan dalam mencatat biaya dan perlakuan pajak. 3) *Fraud*. 4) Klasifikasi item yang tidak tepat. 5) Kesalahan akuntansi pada akun investasi, *goodwill*, aktivitas restrukturisasi, dan penilaian persediaan. 6) Error pada pencatatan pengakuan pendapatan. 7) Kesalahan akuntansi dalam perlakuan saham, derivatif, dan hal-hal yang menyangkut surat berharga.

2.1.3 *Corporate Governance*

Kebutuhan akan adanya *good corporate governance* semakin meningkat sejak terungkapnya skandal-skandal akuntansi yang menyebabkan

hancurnyabeberapa perusahaan besar seperti Enron, World Com dan Merck. Lin *etal.*,(2006) mengungkapkan, sejak nilai perusahaan dihubungkan dengan pelaporanangka laba, hal ini menciptakan insentif ekonomi atau tekanan bagi manajemenuntuk berserikat sengan manajemen laba.

Definisi *corporate governance* menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) (2001) yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan intern, dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut KNKG dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance*, terdapat limaasas dalam menerapkan GCG, yaitu:

1. *Transparent* (keterbukaan), yaitu menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian perusahaan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independency* (Independensi), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.4 Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah pihak yang berperan penting dalam menyediakan laporan keuangan perusahaan yang *reliable*. Keberadaan dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa yang dilakukan oleh manajer (Chtourou et al.,2001). Hal ini terkait pengawasan kepada manajemen agar tidak melakukan praktek manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Berdasarkan UU PT No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 6, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Vafeas (2000) dalam Siallagan (2006) menyatakan bahwa peranan dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan.

Menurut Edgina (2008), dewan komisaris memiliki peran ganda yaitu *monitoring* dan pengesahan (*ratification*). Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer (Chtourou et al., 2001). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin kompeten dewan komisaris maka akan semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan (Edgina, 2008).

Menurut KNKG (2006), menulis beberapa prinsip agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif :

1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

2.1.4.1 Ukuran Dewan Komisaris

Dalam implementasi praktek *good corporate governance*, dewan komisaris memiliki peranan penting. Hal ini tidak terlepas dari tugas utamanya yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh

direksi. Menurut KNKG (2006), jumlah dewan komisaris pada suatu perusahaan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan tersebut. Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka CEO akan semakin mudah dikendalikan dan pengawasan dapat menjadi semakin efektif. Ukuran dewan komisaris ditentukan oleh resiko menyeluruh yang dihadapi perusahaan.

2.1.4.2 Independensi Dewan Komisaris

Dewan komisaris terdiri komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Komisaris yang terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, serta dengan perusahaan itu sendiri, sedangkan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata mata demi kepentingan perseroan. Penelitian menyelidiki peran dewan komisaris independen umumnya merupakan karakteristik penting untuk efektivitas (Kosnik, 1987; Hermalin dan Weisbach, 1988; Weisbach, 1988). Penelitian yang dilakukan (Beasley, 1996) telah menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dikaitkan dengan sedikit kemungkinan terjadinya penipuan keuangan dan berkurangnya *earnings management* (Chtourou et al, 2001;. Klein, 2002;. Peasnell et al, 2005).

Berdasarkan keputusan Direksi BEI nomor: KEP-399/BEJ/07 Pencatatan Efek Nomor I-A menjelaskan bahwa komisaris independen bertanggung jawab

untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa komisaris independen memiliki peranan dalam membatasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan manajemen dan dewan komisaris independen ini bertindak secara independen dan tidak melibatkan pihak lain dalam penguasaannya.

Jumlah komisaris independen ini harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut peraturan Bapepam no. IX.1.5 menjelaskan tentang kriteria-kriteria komisaris independen, yaitu :

- a. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik;
- b. Bukan merupakan orang yang bekerja pada emiten dan perusahaan publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu (enam) bulan terakhir;
- c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
- d. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik;
- e. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik; dan
- f. Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Keberadaan komisaris independen juga telah diatur dalam Peraturan Bursa Efek Jakarta melalui Keputusan BAPEPAM No.Kep-316/BEJ/062000 pada tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa komisaris independen dalam perusahaan harus berjumlah minimal 30% dari total anggota komisaris yang dapat dipilih melalui RUPS. Komposisi tersebut harus memungkinkan agar pengambilan keputusan dapat berjalan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen (KNKG, 2006).

2.1.5 Komite Audit

Pada tahun 2000, pasar saham Indonesia mulai mengharuskan setiap perusahaan yang terdaftar untuk memiliki komite audit. BEJ mensyaratkan bahwa setidaknya seorang anggota komite audit harus memiliki keahlian keuangan (Veronica, 2005). BAPEPAM dalam Kep -29/PM/2004 mewajibkan setiap perusahaan publik wajib memiliki komite audit dan pedoman kerja komite audit. Komite audit merupakan salah satu komite yang dibuat oleh dewan komisaris yang bertujuan untuk membantu dewan komisaris mengawasi dan menjamin kualitas laporan keuangan perusahaan yang akan diterbitkan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip berlaku umum, mengawasi pelaksanaan audit internal dan eksternal telah dilakukan sesuai standar yang berlaku, serta melakukan tindak lanjut temuan hasil audit yang dilaksanakan oleh manajemen. Dalam pedoman *corporate governance* KNKG (2006), komite audit harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengalaman yang memadai yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Peran komite audit dalam upaya untuk menjamin kualitas

daripelaporan keuangan perusahaan telah menjadi suatu pertimbangan yang berarti,terutama setelah maraknya tindakan manajemen laba yang dilakukan pihakmanajemen perusahaan dan skandal akuntansi yang terjadi pada beberapaperusahaan besar di dunia (Lin et.al., 2006), termasuk di Indonesia.

2.1.5.1 Ukuran Komite Audit

BAPEPAM dalam Kep -29/PM/2004 mensyaratkan agar komite audit terdiri dari 3 orang dengan 1 komisaris independen sebagai ketua dan 2 orang anggota dari luar direksi agar dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang berbeda-beda. Anggota komite audit harus bersifat independen agar dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Komite audit yang independen diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan dapat melakukan penilaian secara objektif terhadap auditor eksternal perusahaan.

2.1.5.2 Independensi Komite Audit

Independensi adalah faktor yang penting dalam komite audit. Denganindependensinya, komite audit diharapkan dapat mengatasi konflikkepentingan oleh auditor luar yang menyediakan jasa konsultasi bagi perusahaan(Agrawal et al.,2005), serta dapat melakukan penilaian terhadap efektivitas fungsiinternal audit, independensi dan objektifitas eksternal auditor yang melakukanaudit (IKAI, 2004).Semakinindependen komite audit, maka semakin besar kemungkinan untuk dapat melakukan yang pengawasan pelaporan keuanganyang lebih efektif karena komite audit tidak dipengaruhi

oleh manajemen. Independensi komite audit ini penting karena memastikan objektivitas (Kolins et al., 1991).

Berdasarkan BAPEPAM dalam Kep -29/PM/2004, independensi dapat diartikan sebagai pihak dari luar direksi yang tidak memiliki hubungan usaha dan afiliasi dengan: (1). Perusahaan tercatat, (2). Komisaris, (3). Direksi dan (4). Pemegang saham utama perusahaan tercatat, dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etik profesionalnya dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2.1.5.3 Keahlian Keuangan Komite Audit

Dalam suatu komite audit, paling tidak satu orang anggotanya diharapkan memiliki keahlian di bidang keuangan, paling tidak dalam membaca suatu laporan keuangan. Tanpa adanya keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, komite audit akan kurang mampu dalam mendeteksi masalah dalam pelaporan keuangan (Agrawal, 2005). DeZoort dan Salterio (2001) menyatakan bahwa komite audit dengan keahlian keuangan meningkatkan kemungkinan bahwa salah saji material terdeteksi dan akan dikomunikasikan kepada komite audit dan dikoreksi secara tepat waktu.

2.1.6 Kepemilikan Saham Manjerial

Menurut Boediono (2005) kepemilikan saham manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Pihak manajemen yang dimaksud adalah pengelola perusahaan, seperti direktur, manajer, dan karyawan. Dengan memiliki saham perusahaan, manajemen akan ikut merasakan langsung dampak dari setiap keputusan yang diambil. Hal ini membuat para

manajer akan merasakan konsekuensi langsung dari setiap keputusan yang diambil. Jika dikaitkan dengan teori agensi, manajer yang sekaligus pemegang saham akan berusaha meningkatkan kinerjanya sehingga hal ini dapat berdampak baik bagi perusahaan dan para pemegang saham. Kepemilikan saham manajerial disebut sebagai solusi untuk mengurangi konflik agensi, dimana para manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan bagi perusahaan karena efek dari keputusan yang dihasilkan akan memiliki manfaat langsung bila keputusan yang diambil tepat, serta kerugian bila mengambil keputusan yang salah. Manajer yang memiliki saham cukup besar, mereka diharapkan untuk mendominasi perusahaan. Mereka akan memiliki insentif yang lebih besar untuk menunjukkan kepada pemegang saham lain bahwa perusahaan telah melakukan sangat baik secara finansial. Jensen (1986) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan akan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, sehingga kinerja serta kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat.

2.1.7 Kepemilikan Saham Institusional

Pengertian dari kepemilikan saham institusional adalah saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Menurut Wening (2007) dalam Sabrina (2010), kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional

terlibat dalam pengambilan yang strategis perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena setiap keputusan yang dilakukan oleh manajemen akan mempunyai dampak langsung bagi investor.

Investor institusi cenderung memiliki perilaku aktif dalam memonitoring kinerja manajemen. Hal tersebut akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pengawasan lain yang dilakukan oleh investor adalah dengan memberi masukan masukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Cornet et al., (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri.

2.2 Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menguji pengaruh antara karakteristik *corporate governance* terhadap *financial restatement* (penyajian kembali laporan keuangan).

1. Penelitian Lin, Jun F. Li, dan Joon S. Yang (2006) menguji pengaruh antara karakteristik komite audit yang diproksikan dengan independensi, ukuran, keahlian, frekuensi rapat, dan kepemilikan saham komite audit terhadap penyajian kembali laporan keuangan. Dari hasil penelitian tersebut, ukuran komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penyajian kembali laporan keuangan.

2. Abdullah (2010) yang meneliti pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap keterjadian *financial restatement* menemukan bahwa *restatement* terjadi pada perusahaan yang independensi komite nominasinya rendah serta memiliki proporsi kepemilikan manajerial yang tinggi, selain itu independensi komite audit berhubungan dengan keterjadian *earningrestatement*.
3. Selanjutnya, penelitian Lary dan Dennis W. Taylor (2011) menemukan bahwa semakin besar independensi komite audit dan kompetensi komite audit, maka semakin kecil pula tingkat keterjadian penyajian kembali laporan keuangan.
4. Di Indonesia, Yuristisia dan Niki Lukviarman (2008) menguji pengaruh antara *strong boards* terhadap *restatement* dan menemukan hubungan signifikan negatif antara *strong boards* terhadap *restatement* pada perusahaan kecil dan hubungan positif antara *strong boards* dengan *restatement* pada perusahaan besar.
5. Veronica dan Yanivi S. Bachtiar (2005) meneliti tentang karakteristik *corporate governance* (komposisi dewan komisaris, independensi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan intitusional, kepemilikan blockholder, kualitas audit) terhadap keterjadian penyajian kembali. Dari penelitian tersebut, Veronica dan Yanivi menemukan independensi dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap keterjadian penyajian kembali (*restatement*).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rani (2011) mengenai “ Pengaruh Kinerja Komite Audit Terhadap Manajemen laba (dengan menggunakan *earningrestatement* sebagai proksi dari manajemen laba)”. Penelitian tersebut membuktikan bahwa anggota komite audit mampu mengeliminasi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.
7. Nina Pertiwi (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “*Hubungan antara performa komite audit dengan earnings quality*” menemukan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap keterjadian *earning restatement*.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Judul	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
<i>The Role of Corporate Governance to Preventing Misstated Financial Statement</i>	<i>Earning Restatement</i>	Komposisi dewan komisaris, independen dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan blockholder, dan kualitas audit	Independensi dewan komisaris, proporsi kepemilikan saham institusional dan kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap terjadinya <i>earning restatement</i>
<i>The Effect of Audit Committee Performance on Earnings Quality</i>	<i>Earning Restatement</i>	Independensi komite audit, ukuran komite audit, keahlian komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan kepemilikan saham komite audit	Terdapat hubungan negatif signifikan antara ukuran komite audit dengan terjadinya <i>restatement</i> . Karakteristik komite audit yang lainnya tidak berpengaruh terhadap <i>restatement</i>
<i>Financial Restatement and Corporate Governance among Malaysia Listed Companies</i>	<i>Financial Restatement</i>	<i>Board independence, nominating comitee, audit committee independence, managerial ownership, outside blockholder</i>	Kepemilikan saham Blockholder berpengaruh negatif signifikan terhadap terjadinya <i>restatement</i> . <i>Independence board, nominating commitee independence, CEO duality, dan Managerial Ownership</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>restatement</i> .

Pengaruh Kinerja Komite Audit Terhadap Manajemen Laba	<i>Earning Restatement</i>	Independensi komite audit, ukuran komite audit, keahlian di bidang keuangan komite audit, pertemuan (rapat) komite audit	Independensi komite audit secara signifikan berpengaruh negatif terhadap keterjadian <i>earningrestatement</i> . Karakteristik komite audit lain tidak berpengaruh signifikan terhadap keterjadian <i>earning restatement</i> .
<i>Governance Characteristic and role of Audit Committee</i>	<i>Financial restatement Non service audit fee ratio</i>	<i>Independence audit commite , financial expertise audit committee, diligence audit commite</i>	<i>Independence dan Financial expertise</i> komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap keterjadian <i>restatement</i> . <i>Diligence Audit Commitee</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>non service audit fee ratio</i>
Hubungan antara performa komite audit dengan <i>earning quality</i>	<i>Earning Restatement</i>	Independensi komite audit, ukuran komite audit, keahlian di bidang financial, frekuensi pertemuan rapat, kepemilikan saham komite audit	Independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap keterjadian <i>earningrestatement</i> . 4 karakteristik komite audit lain tidak berpengaruh signifikan terhadap keterjadian <i>restatement</i> .

nelitian-penelitian terdahulu

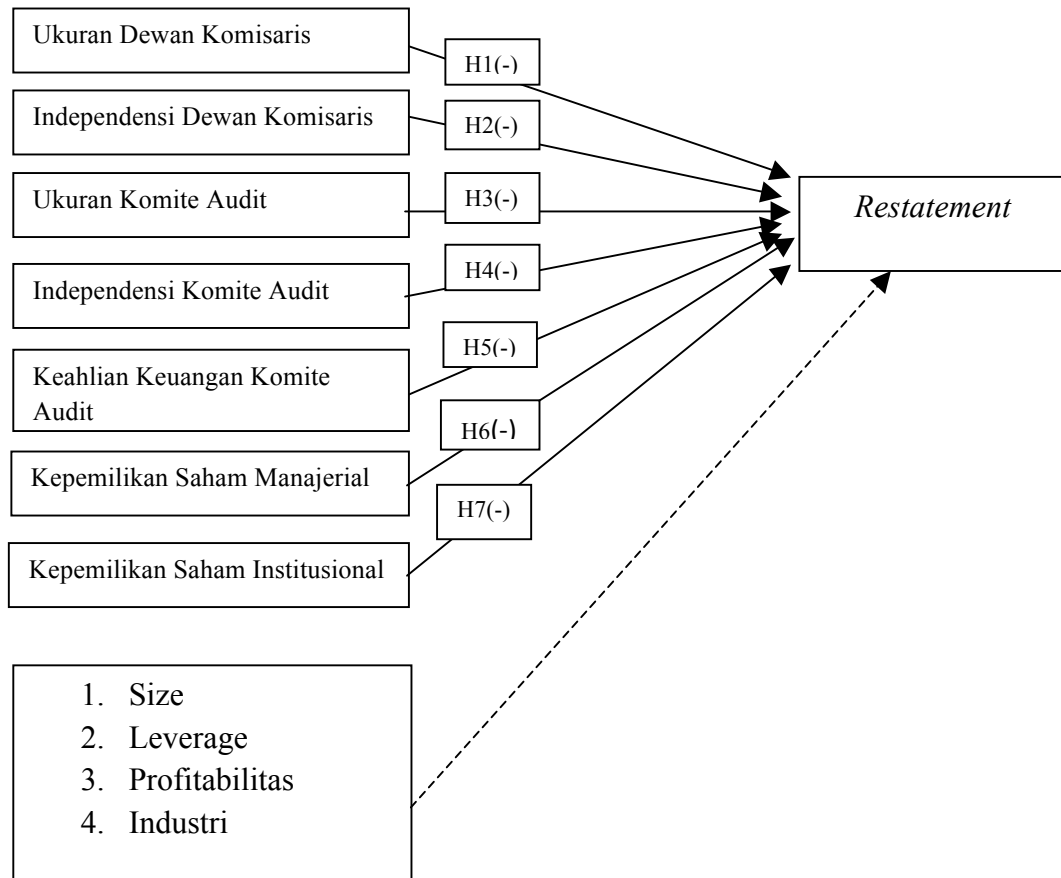
2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penyajian laporan keuangan sebuah perusahaan, sering ditemukan hal-hal yang menyebabkan laporan keuangan harus direvisi ataupun disajikan kembali. Sesuai dengan PSAK no. 25 (Revisi 2012) paragraf 1, bahwa *restatement* laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu: perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang baik terhadap perusahaan, yaitu dengan peran dewan komisaris independen yang akan memberi pengaruh terhadap kualitas pelaporan informasi perusahaan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (variabel terikat) berupa penyajian kembali laporan keuangan (*restatement*). Sedangkan variabel independen (variabel bebas) berupa karakteristik *corporate governance*. *Restatement* dipilih menjadi variabel dependen karena mudah diobservasi serta merupakan kejadian langka yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan.

Di bawah ini adalah gambaran skema kerangka pikir teoritis dari penelitian ini,

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Restatement* Laporan Keuangan

Jumlah dewan komisaris pada suatu perusahaan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan tersebut (KNKG, 2006). Teori agensi menyatakan bahwa konflik agensi disebabkan karena kurangnya pengawasan yang mengakibatkan tidak seimbangnya informasi yang dimiliki pihak prinsipal dengan pihak agen. Untuk menekan konflik, diperlukan wakil dari pihak prinsipal yang bertugas

mengawasi kinerja manajemen. Dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang dipilih dan diberi wewenang oleh pemegang saham untuk memonitor kinerja manajemen. Ukuran dewan komisaris adalah unsur penting dalam pembentukan dewan komisaris. Perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen mempunyai lebih rendah probabilitas penipuan akuntansi dan manajemen laba (Beasley (1996), Dechow et al. (1996), dan Klein (2002).

Yuristia dan Niki Lukviarman (2008) telah melakukan penelitian terhadap hubungan ukuran dewan komisaris yang mana hasilnya menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap keterjadian *restatement*.

Bedasarkan uraian di atas, untuk melihat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *earning restatement*, dibuatlah hipotesis sebagai berikut

H1 : Terdapat pengaruh negatif antara jumlah ukuran dewan komisaris terhadap keterjadian *restatement*.

2.4.2 Independensi Dewan Komisaris Terhadap *Restatement* Laporan Keuangan

Dewan komisaris terdiri komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Berdasarkan keputusan Direksi BEI nomor: KEP-399/BEJ/07 Pencatatan Efek Nomor I-A menjelaskan bahwa komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa komisaris independen memiliki peranan dalam membatasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan manajemen dan dewan komisaris

independen ini bertindak secara independen dan tidak melibatkan pihak lain dalam penguasaannya. Keputusan BAPEPAM No. Kep-316/BEJ/062000 pada tanggal 1 Juli 2000, mengatur keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan, yaitu harus berjumlah minimal 30% dari total anggota komisaris yang dapat dipilih melalui RUPS.

Teori agensi menyatakan bahwa dalam meminimalkan tingkat kesalahan informasi, diperlukan pengawasan langsung dari pihak yang berasal dari wakil prinsipal. Pengawasan terhadap manajemen akan semakin meningkat dan konflik agensi juga dapat ditekan dengan adanya komisaris independen dalam dewan komisaris yang akan berdampak pada kualitas laporan keuangan. Dewan komisaris independen dikaitkan dengan sedikit kemungkinan terjadinya penipuan keuangan (Beasley, 1996), berkurangnya *earnings management* (Chtourou et al, 2001; Klein, 2002; Peasnell et al, 2005). Agrawal dan Chada (2005) menemukan bahwa kemungkinan penyajian kembali adalah lebih rendah ketika dewan komisaris atau komite audit menjadi direktur independen dengan keahlian keuangan. Lalu Veronica dan Yanivi S. Bachtiar (2005) melakukan penelitian mengenai pengaruh proporsi komisaris independen dan komite audit terhadap keterjadian *restatement* dan hasilnya proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap keterjadian *restatement*.

Jadi, kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan, dengan adanya komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris, fungsi pengawasan terhadap manajemen akan semakin baik karena komisaris independen dapat bekerja secara netral dan tanpa ada intervensi dari pihak manajemen. Dengan begitu, pengawasan

terhadap manajemen akan semakin ketat sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin meningkat.

H2: Independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap keterjadian *restatement*.

2.4.3 Ukuran Komite Audit Terhadap *Restatement* Laporan Keuangan

BAPEPAM dalam Kep -29/PM/2004 mensyaratkan agar komite audit terdiri dari 3 orang dengan 1 komisaris independen sebagai ketua dan 2 orang anggota dari luar direksi agar dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang berbeda-beda. Berdasarkan teori keagenan, konflik kepentingan antara agen dan prinsipal disebabkan karena prinsipal tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kegiatan agen, yang dapat mendorong agen menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal. Dengan adanya komite audit, maka aktivitas manajemen dapat dipantau tanpa adanya intervensi dari pihak manapun karena komite audit bersifat independen.

Lin, Jun F. Li, dan Joon S. Yang (2006) telah melakukan penelitian tentang hubungan antara karakteristik komite audit dengan keterjadian *restatement* dan hasilnya berupa adanya hubungan negatif signifikan antara ukuran komite audit dengan keterjadian *restatement*. Kemudian, Yang dan Krishnan (2005) menemukan bahwa ukuran komite audit berhubungan negatif dengan manajemen laba (menggunakan akrual tidak normal sebagai proksi), menyiratkan bahwa sejumlah minimum tertentu audit anggota komite mungkin relevan dengan kualitas pelaporan keuangan.

Menurut KNKG, jumlah efektif dari komite audit adaah 3-5 orang, dimana apabila komite audit terlalu kecil maka fungsi pengawasan akan menjadi tidak maksimal karena kekurangan sumberdaya untuk pendistribusian tugas-tugas komite audit. Selain itu, dengan semakin banyaknya komite audit yang ada di dalam perusahaan, maka semakin baik dalam pengawasannya. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis:

H3: Terdapat hubungan negatif antara ukuran komite audit terhadap keterjadian *restatement*.

2.4.4 Independensi Komite Audit Terhadap Keterjadian *Restatement*

Selain memperhatikan ukuran, independensi menjadi karakteristik yang sangat penting bagi komite audit. Semakin independen komite audit, maka semakin besar kemungkinan untuk dapat melakukan yang pengawasan pelaporan keuanganyang lebih efektif karena komite audit tidak dipengaruhi oleh manajemen. Independensi komite audit ini penting karena memastikan objektivitas (Kolins et al., 1991), serta dapat melakukan penilaian terhadap efektivitas fungsi internal audit (IKAI, 2004). Dengan semakin banyaknya anggota komite audit yang independen diharapkan kualitas laporan keuangan akan semakin baik.

Teori agensi menyatakan bahwa dalam meminimalkan tingkat kesalahan informasi, diperlukan pengawasan langsung dari pihak yang berasal dari wakil prinsipal. Pengawasan terhadap manajemen akan semakin meningkat dan konflik agensi juga dapat ditekan dengan adanya komite audit independen yang akan berdampak pada kualitas laporan keuangan.

Abbott et al. (2004) melaporkan bahwa komite audit yang independen, bertemu setidaknya empat kali dalam setahun, dan termasuk setidaknya satu anggota dengan keahlian keuangan berhubungan negatif dengan terjadinya *restatement*. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis:

H4 : Terdapat pengaruh negatif antara independensi komite audit terhadap keterjadian *restatement*.

2.4.5 Keahlian Keuangan Komite Audit Terhadap Keterjadian *Restatement*

Dalam suatu komite audit, paling tidak satu orang anggotanya diharapkan memiliki keahlian di bidang keuangan, paling tidak dalam membaca suatu laporan keuangan. Tanpa adanya keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, komite audit akan kurang mampu dalam mendeteksi masalah dalam pelaporan keuangan (Agrawal, 2005). DeZoort dan Salterio (2001) menyatakan bahwa komite audit dengan keahlian keuangan meningkatkan kemungkinan bahwa salah saji material terdeteksi dan akan dikomunikasikan kepada komite audit dan dikoreksi secara tepat waktu. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis:

H5 : Terdapat pengaruh negatif antara keahlian keuangan komite audit terhadap keterjadian *restatement*.

2.4.6 Kepemilikan Saham Manajerial Terhadap Keterjadian *Restatement*

Kepemilikan manajerial dapat meringankan konflik keagenan (Jensen and Meckling, 1976) dan dengan demikian menyebabkan keinformatifan laba yang lebih tinggi (Warfield et al., 1995). Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian oleh Fama dan Jensen (1983) yang berpendapat bahwa struktur kepemilikan tersebar menciptakan konflik antara pemilik dan manajer karena manajer tidak

selalu bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham. Jika dikaitkan dengan teori agensi, manajer yang sekaligus pemegang saham akan berusaha meningkatkan kinerjanya sehingga hal ini dapat berdampak baik bagi perusahaan dan para pemegang saham. Kepemilikan saham manajerial disebut sebagai solusi untuk mengurangi konflik agensi, dimana para manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan bagi perusahaan karena efek dari keputusan yang dihasilkan akan memiliki manfaat langsung bila keputusan yang diambil tepat, serta kerugian bila mengambil keputusan yang salah. Ross et al (1999) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan sendiri. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah hipotesis:

H6 : Terdapat pengaruh negatif antara kepemilikan institusional terhadap keterjadian *restatement*

2.4.7 Kepemilikan Saham Institusional Terhadap Keterjadian *Restatement*

Kepemilikan saham institusional adalah saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, danaperwalian dan institusi lainnya. Pemegang blok atau investor institusi yang memegang posisi utang atau ekuitas yang besar dalam sebuah perusahaan sangat penting untuk sistem pemerintahan yang berfungsi dengan baik. Investor institusi yang diharapkan memiliki pemantauan ketat atas proses manajemen pengambilan keputusan, termasuk pemilihan metode akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan keuangan (Jensen, 1993). Investor institusi cenderung memiliki

perilaku aktif dalam memonitoring kinerja manajemen. Hal tersebut akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Cornet et al., (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri.

Teori agensi menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat mencegah timbulnya konflik agensi yang disebabkan oleh para investor institusi melakukan pengawasan terhadap manajemen dengan sumber daya yang mereka miliki. Hal tersebut timbul karena kekayaan mereka terikat langsung ke perusahaan, dengan kata lain kinerja manajemen akan sangat berdampak bagi mereka. Penelitian dari Veronica dan Yanivi S. Bachtiar (2005) menghasilkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap keterjadian *restatement*, yang artinya semakin besar tingkat kepemilikan institusional, tingkat *restatement* akan semakin rendah. Berdasarkan uraian di atas, maka dibuatlah hipotesis:

H7 : Terdapat pengaruh negatif antara kepemilikan institusional terhadap keterjadian *restatement*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Terdapat beberapa jenis variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol. Variabel dependen yang akan dijadikan objek penelitian adalah penyajian kembali laporan keuangan (*restatement*). Variabel independen yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan saham institusional. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan jenis industri.

3.1.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat oleh variabel bebas (*independent*). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *restatement*, yaitu penyajian kembali laporan keuangan karena adanya suatu kesalahan saji yang material dimana perusahaan menyajikan ulang dan menginformasikan kepada investor bahwa laporan keuangan yang sudah dibuat tidak valid atau tidak berlaku lagi. *Restatement* dibuat untuk mengoreksi kesalahan dalam membuat laporan keuangan. Pengukuran variabel *restatement* menggunakan dummy. Angka nol (0) menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan *restatement* laporan keuangan dan angka satu (1) menunjukkan bahwa perusahaan melakukan *restatement* laporan keuangan.

3.1.2 Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah karakteristik *corporate governance*.

3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris mempunyai fungsi yang sangat penting dalam perusahaan. Semakin banyak ukuran dewan komisaris diharapkan akan mampu membuat pengawasan menjadi lebih efektif. Variabel ukuran dewan komisaris dinyatakan dengan (DKSIZE) dan diukur dengan menghitung jumlah dewan komisaris yang ada di perusahaan.

3.1.2.2 Independensi Dewan Komisaris

Bapepam dalam peraturan nomor IX.I.5 tahun 2004 tentang kriteria-kriteria menjadi dewan komisaris independen menyatakan dewan komisaris independen harus memenuhi syarat syarat seperti ; (a) berasal dari luar emiten (b) tidak memiliki saham perusahaan emiten (c) tidak memiliki hubungan bisnis atau hubungan lain dengan stakeholder perusahaan. Hal ini dikarenakan untuk menghindari adanya pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi kemampuan dewan komisaris untuk bertindak independen. Diharapkan dengan proporsi dewan komisaris independen yang semakin besar, maka memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap kegiatan perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat dan praktek manajemen laba dapat ditekan.

Variabel independensi dewan komisaris dinyatakan dengan (INDEP) dan diukur dengan menghitung rasio dewan komisaris independen terhadap total dewan komisaris perusahaan.

3.1.2.3 Ukuran Komite Audit

BAPEPAM dalam Kep -29/PM/2004 mensyaratkan agar komite audit terdiri dari 3 orang dengan 1 komisaris independen sebagai ketua dan 2 orang anggota dari luar direksi agar dapat berjalan dengan efektif. Variabel ukuran komite audit dalam penelitian ini dinyatakan dengan (KASIZE) dan diukur dengan jumlah anggota di dalam komite audit.

3.1.2.4 Independensi Komite Audit

Salah satu elemen penting dalam keanggotaan komite audit adalah independensi. Berdasarkan Keputusan Bapepam Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit dijelaskan bahwa suatu komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Variabel penelitian ini dinyatakan dengan (INDD). Variabel ini merupakan variabel dummy. Nilai "1" digunakan jika seluruh anggota komite audit adalah independen dan nilai "0" jika tidak semua anggota komite audit adalah independen.

3.1.2.5 Keahlian Dalam Bidang Keuangan Pada Komite Audit

Keahlian di bidang keuangan (*Financial Expertise*) adalah salah satu syarat dalam keanggotaan komite audit. Setidaknya dalam satu komite audit, terdapat satu

anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi. Hal ini penting, karena salah satu objek yang diawasi oleh komite audit adalah laporan keuangan.

Variabel penelitian ini dinyatakan dengan (FINEX). Variabel keahlian di bidang keuangan ini dihitung berdasarkan jumlah komite audit yang memiliki keahlian atau pengetahuan dalam bidang ekonomi.

3.1.2.6 Kepemilikan Saham Manajerial

Kepemilikan saham manajerial dianggap dapat menjadi sarana untuk mengurangi praktek manajemen laba dalam perusahaan. Manajemen yang memiliki saham di perusahaan akan cenderung termotivasi untuk bekerja dengan lebih giat, karena manajemen akan merasakan dampak langsung dari keputusan yang dibuatnya di dalam perusahaan.

Variabel ini dinyatakan dengan (STOCKM). Mengacu pada penelitian Abdullah (2010), pengukuran saham manajerial dihitung berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajerial terhadap total saham perusahaan.

3.1.2.7 Kepemilikan Saham Institusional

Kepemilikan saham institusional adalah saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et al. 2006) dalam Winanda (2009). Semakin besar kepemilikan institusi, maka kekuatan suara dan dorongan terhadap pengawasan kinerja manajemen akan semakin meningkat sehingga kualitas laporan keuangan dapat meningkat dan tingkat keterjadian *restatement* akan semakin rendah..

Veronica (2005) mengukur variabel kepemilikan institusional dengan menghitung proporsi saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya terhadap total saham pada perusahaan. Pada penelitian ini, saham institusional diberi kode (STOCKINS).

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan menjumlahkan nilai total aset yang diukur dengan presentase kenaikan penjualan. Kemudian, *leverage* perusahaan yang diukur dengan menghitung total hutang perusahaan terhadap total aset perusahaan. Variabel kontrol lainnya, yaitu profitabilitas yang diukur dengan menghitung laba bersih terhadap ekuitas shareholder. Variabel kontrol yang terakhir adalah jenis industri yang diukur dengan variabel dummy, dimana angka 1, jika perusahaan masuk ke dalam kategori non-keuangan, sedangkan angka 0, jika jenis perusahaan merupakan kategori keuangan.

3.1.3.1 Ukuran Perusahaan (*Size*)

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai logaritma natural dari total aset yang dimiliki perusahaan.

3.1.3.2 Tingkat Hutang Perusahaan (*Leverage*)

Tingkat hutang perusahaan adalah tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan pendanaan tetap (hutang) untuk tujuan perusahaan. Tingkat hutang perusahaan dapat dihitung dengan membagi total hutang dengan total aset.

3.1.3.3 Profitabilitas (ROA)

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (profit) pada periode tertentu. ROA adalah kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor baik pemegang obligasi maupun pemegang saham (Riyanto, 2001). *Return on asset* merupakan ukuran efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{ROA} = \text{Laba bersih setelah pajak (EAT)} / \text{Total aktiva}$$

3.1.3.4 Jenis Industri (INDUS)

Ada perbedaan dari sisi aturan yang mengatur secara spesifik bagaimana lembaga keuangan dijalankan. Ada ukuran tertentu yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang tidak diberlakukan bagi perusahaan non-keuangan. Dengan adanya aturan-aturan ini akan mengurangi risiko yang dihadapi oleh investor berkaitan dengan ketidakpastian. Sehingga investor kemungkinan akan menilai perusahaan keuangan lebih tinggi dibandingkan industri lainnya. Untuk mengontrol efek industri pada penelitian ini, digunakan

dummy apabila perusahaan masuk ke dalam kategori non-keuangan akan diberikan nilai 1, sedangkan apabila jenis perusahaan keuangan akan diberi nilai 0.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2009-2013. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria yang dikehendaki oleh peneliti. Kriteria yang dimaksud adalah:

1. Perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2013
2. Sampel merupakan perusahaan yang melakukan penyajian kembali (*restatement*) sesuai kriteria dari *GAO's definition of restatement* (2006) pada laporan keuangannya selama periode 2009-2013.
3. Perusahaan memiliki data keuangan yang lengkap.
4. Perusahaan yang memiliki ketersediaan data tentang karakteristik *corporate governance* yang lengkap. Data tersebut diambil dari laporan tahunan perusahaan pada tahun sebelumnya (t-1).
5. Sampel perusahaan yang melakukan *restatement* akan dipasangkan dengan perusahaan yang tidak melakukan *restatement* berdasarkan klasifikasi industri dan ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan yang dipakai adalah total aset.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2009-2013. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs web www.idx.co.id dan situs perusahaan yang bersangkutan. Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013. Pencarian penyajian kembali dicari dengan melihat laporan keuangan perusahaan dan mencari dengan kata kunci seperti, penyajian kembali, disajikan kembali, penerbitan kembali, *restate*, dan *restatement*.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan mengolah literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan artikel ini. Sedangkan metode studi dokumentasi adalah pengumpulan data dari sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

3.5 Metode Analisis Data

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen terhadap *restatement* pada perusahaan yang melakukan *restatement* dengan perusahaan yang tidak melakukan *restatement*. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu dengan regresi logistik. Statistik deskriptif juga digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel variabel dalam penelitian ini. Selain itu, dilakukan pengujian kelayakan model regresi

untuk menilai model regresi dalam penelitian ini. Berikut penjelasan terperinci mengenai metode analisis dalam penelitian ini.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan saham institusional. Standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum menggambarkan persebaran data, dimana data yang memiliki standar deviasi yang semakin besar menggambarkan bahwa data tersebut semakin menyebar.

3.5.2 Analisis Regresi Logistik

Teknik menganalisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan regresi logistik. Alasan menggunakan analisis regresi logistik, karena variabel terikat pada penelitian ini merupakan variabel dummy. Menurut (Ghozali, 2011) dalam pengujian *multivariate* dengan *binary logistic regression*, tidak diperlukan uji normalitas, heteroskedastisitas, dan uji asumsi klasik pada variabel dependennya.

Model logistik digunakan untuk melihat kemungkinan perusahaan akan melakukan tindakan *restatement* pada masa yang sama. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang mengalami *restatement* dan sebaliknya yaitu perusahaan yang tidak melakukan *restatement*. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini menggunakan variabel ukuran dewan

komisaris, independensi dewan komiaris, ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan saham institusional. Dalam pengujian *multivariate* akan digunakan analisis regresi logistik dengan model:

$$RESTATEMENT = \alpha + \beta 1 DKSIZ E_{(t-1)} + \beta 2 INDEP_{(t-1)} + \beta 3 KASIZ E_{(t-1)} + \beta 4 INDD_{(t-1)} + \beta 5 FINEX_{(t-1)} + \beta 6 STOCKM_{(t-1)} + \beta 7 STOCKINS_{(t-1)} + \beta 8 SIZE_{(t-1)} + \beta 9 LEV_{(t-1)} + \beta 10 ROA_{(t-1)} + \beta 9 INDUS_{(t-1)} + e$$

Dimana :

RESTATEMENT : Merupakan variabel dummy, angka 1 apabila terjadi *restatement*, angka 0 apabila tidak terjadi *restatement*.

DKSIZE : Dewan komisaris yang ada di perusahaan.

INDEP : Persentase dewan komisaris independen terhadap jumlah anggota dewan komisaris.

KASIZE : Jumlah anggota di dalam komite audit.

INDD : Nilai “1” digunakan jikaseluruh anggota komite audit adalah independen dan nilai “0” jika tidak semua anggota komite audit adalah independen.

FINEX : Jumlah komite audit yang memiliki keahlian dalam bidang ekonomi.

STOCKM : Persentase saham yang dimiliki manajerial terhadap total saham perusahaan.

STOCKINS : Persentase jumlah saham yang dimiliki oleh para investor institusi terhadap total saham perusahaan.

SIZE: Logaritma natural total aset perusahaan.

LEV : Total hutang dibagi dengan total aset.

ROA : Laba bersih dibagi dengan total aset.

INDUS : Nilai “1” digunakan jika perusahaan masukke dalam kategori non-keuangan, sedangkan nilai “0”, jika jenis perusahaan merupakan kategori keuangan.

(t-1) : Satu tahun sebelum perusahaan mengalami *restatement*.

Sebelum melakukan pengujian menggunakan regresi logistik, perlu adanya pengujian terhadap data. Analisis ini menggunakan:

3.5.2.1 Uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit*

Uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit* dinilai untuk menguji kelayakan regresi. *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit* menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model atau tidak ada perbedaan antara model dengan data, sehingga dapat dikatakan fit.

Menurut Ghozali (2011) hipotesis yang digunakan dalam model fit adalah:

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Tests* sama dengan atau kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness fit* model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit* lebih dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu untuk memprediksi nilai observasinya atau model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2011).

3.5.2.2 Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*) digunakan untuk menilai apakah model yang telah dihipotesiskan telah fit dengan data atau tidak. Penilaian keseluruhan model dilakukan dengan membandingkan nilai antara $-2 \text{ Log Likelihood}$ (-2LL) pada saat model hanya memasukkan konstanta dengan -2 Log

Likelihood (*Block Number* = 0), dengan saat model memasukkan konstanta dan variabel bebas (*block number* 1). Apabila -2Log Likelihood (*Block Number*= 0) > daripada -2Log Likelihood (*Block Number*=1), maka keseluruhan model menunjukkan regresi yang baik. Semakin mengalami penurunan, maka model regresi semakin baik atau dengan kata lain model yang telah dihipotesiskan fit dengan data.

3.5.2.3 Koefisien Determinasi (*Nagelkerke's R square*)

Hasil perhitungan dari *Nagelkerke's R Square* digunakan untuk menunjukkan seberapa besar model yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependen dengan menggunakan variabel independen pada penelitian ini. *Nagelkerke R square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell R square* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai *Cox and Snell R square* dengan nilai maksimumnya. Nilai *nagelkerke's R²* dapat diinterpretasikan seperti nilai R^2 pada *multiple regression* (Ghozali, 2011). Nilai *Nagelkerke R square* bervariasi antara satu (1) dan nol (0), dimana apabila model semakin mendekati nilai 1, maka model dianggap semakin *goodness of fit* sementara semakin mendekati nilai 0 maka model semakin tidak *goodness of fit* (Ghozali, 2011)

3.5.2.4 Pengujian Signifikansi Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *restatement*. Koefisien regresi logistik dapat ditentukan dengan menggunakan p-value (*probability value*).

- a. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5% (0,05)

b. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi p-value. Jika p-value (signifikan) $> \alpha$, maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika p-value $< \alpha$, maka hipotesis alternatif diterima.